

ANALISIS PENGELUARAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PENDUDUK KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2008 DAN 2009

Taryono dan Hendro Ekwarso

Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengeluaran dan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Provinsi Riau. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari data SUSENAS tahun 2008 dan 2009.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Riau periode 2008-2009 mengalami peningkatan. Proporsi pengeluaran bahan makanan turun dari 50,30 persen pada tahun 2008 menjadi 48,34 persen ditahun 2009 dan proporsi pengeluaran bahan non makanan meningkat dari 49,70 persen ditahun 2008 meningkat menjadi 51,66 persen di tahun 2009.

Sebagian besar penduduk Provinsi Riau berada pada golongan pengeluaran perkapita kelas menengah. Persentase jumlah penduduk pada golongan pengeluaran kelas menengah di Provinsi Riau mengalami peningkatan dari 38,88 persen pada tahun 2008 meningkat menjadi 51,06 persen pada tahun 2009. Peningkatan persentase jumlah penduduk pada golongan pengeluaran kelas menengah bukan hanya disebabkan oleh bergesernya tingkat kesejahteraan penduduk dari golongan pengeluaran perkapita kelas terendah ke menengah tapi juga disebabkan oleh penurunan tingkat kesejahteraan penduduk pada golongan pengeluaran perkapita kelas tertinggi yang bergeser ke golongan pengeluaran perkapita kelas menengah. Sehingga ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Riau pada tahun 2008 sebesar 0,3441 dan pada tahun 2009 sebesar 0,3650 dengan kategori ketimpangan sedang.

Kata kunci : Distribusi pendapatan, pengeluaran.

1. PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diantaranya tercermin dari meningkatnya pendapatan riil perkapita penduduk. Supaya pendapatan perkapita riil penduduk terus meningkat, maka dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang bersifat *sustainable*. Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh dengan cepat dapat didorong dengan peningkatan atau penambahan faktor produksi modal (*capital*). Pendekatan pembangunan ekonomi yang menekankan pada pentingnya proses pembentukan modal mungkin merupakan pendekatan yang paling berpengaruh dan bertahan lama, pertama, bila dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan lain mempunyai landasan teoritis yang cukup kuat, seperti ditunjukkan oleh model Harrod-Domar. Model tersebut menunjukkan hubungan antara pertumbuhan investasi dengan pendapatan nasional. Kedua karena aliran fundamentalis modal ini sejalan dengan tujuan-tujuan dan keinginan dari para donor bantuan luar negeri pada era 1950-an dan 1990-an. Pada akhirnya keterbatasan modal dinilai sebagai satu-satunya hambatan pokok bagi percepatan pembangunan ekonomi (Lincoln Arsyad, 1998: 89-90).

Namun perlu diingat bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali mengabaikan aspek pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Mengingat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, penambahan capital akan lebih berperan dari pada penambahan tenaga kerja. Proporsi faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa akan berpengaruh terhadap balas jasa yang akan diterima oleh masing-masing faktor produksi tersebut.

Balas jasa yang diterima dari penggunaan faktor produksi capital dapat berupa laba, bunga maupun sewa, sedangkan balas jasa yang diterima dari penggunaan faktor produksi tenaga kerja adalah berupa upah atau gaji. Jika dalam suatu perekonomian proporsi penggunaan modal atau capital lebih tinggi daripada penggunaan tenaga kerja dan kepemilikan modal hanya dikuasai oleh sekelompok orang, maka kue pertumbuhan yang dihasilkan sebagian besar akan dinikmati oleh para pemilik modal tersebut. Distribusi pendapatan dapat lebih parah lagi jika kualitas faktor produksi tenaga kerja yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut juga rendah.

Penduduk Provinsi Riau sebagian besar tinggal pada wilayah pedesaan. Pendapatan rumah tangga pedesaan sangat bervariasi. Variasi itu tidak hanya disebabkan oleh faktor potensi daerah, tetapi juga karakteristik rumah tangga. Aksesibilitas ke daerah perkotaan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi seringkali merupakan faktor dominan terhadap variasi struktur pendapatan rumah tangga pedesaan. Secara garis besar ada dua sumber pendapatan rumah tangga pedesaan yaitu sektor pertanian dan non-pertanian. Struktur dan besarnya pendapatan dari sektor pertanian berasal dari usahatani/ternak dan berburuh tani. Sedangkan dari sektor nonpertanian berasal dari usaha nonpertanian, profesional, buruh nonpertanian dan pekerjaan lainnya di sektor nonpertanian (Supadi dan Nurmanaf, 2004).

Keragaan pendapatan masyarakat tersebut akan menentukan pola pengeluaran rumah tangga. Semakin besar pendapatan seseorang maka akan semakin besar pula pengeluaran konsumsi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam hal ini dapat digolongkan kedalam konsumsi bahan makanan dan bukan bahan makanan. Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat diukur melalui besarnya konsumsi/ pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga yang bersangkutan.

Peningkatan konsumsi/pengeluaran rumah tangga, terutama porsi pengeluaran untuk bukan makanan, menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan (BPS : Susenas, 2006). Pada dasarnya tingkat kemiskinan mutu masyarakat erat hubungannya dengan kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, kesenjangan distribusi pendapatan di antara anggota masyarakat mempunyai korelasi positif dengan besarnya proporsi rumah tangga miskin di suatu komunitas (Zakaria dan Swastika dalam Prasetyawan, 2004).

Secara makro ekonomi pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki peranan penting dalam suatu perekonomian. Hal ini dikarenakan *pertama*, konsumsi rumah tangga memberikan pemasukan kepada pendapatan nasional. Di kebanyakan negara pengeluaran konsumsi sekitar 60-75 persen dari pendapatan nasional. *kedua*, konsumsi rumah tangga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi kegiatan ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya. Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. (Sukirno, 2003).

2. METODE ANALISIS

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data konsumsi/pengeluaran dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Periode waktu yang digunakan untuk menganalisis pengeluaran dan distribusi pendapatan masyarakat pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau adalah tahun 2008 dan 2009. Periode ini digunakan mengingat pada periode ini perekonomian Provinsi Riau yang mengarah monokultur pada komoditi kelapa sawit mengalami goncangan akibat krisis global.

Pengeluaran penduduk dapat digolongkan kedalam pengeluaran untuk bahan makanan dan pengeluaran penduduk untuk non bahan makanan. Semakin tinggi kontribusi pengeluaran non bahan makanan dibandingkan dengan kontribusi pengeluaran bahan makanan menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan penduduk relatif lebih baik. Berdasarkan tujuan penelitian untuk mengetahui pola pengeluaran masyarakat di Provinsi Riau, maka analisis akan dilakukan terhadap kontribusi pengeluaran masyarakat. Selanjutnya untuk menghitung besarnya kontribusi dapat dihitung dengan fomulasi sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi}_{\text{BM/NBM}} = \frac{\text{Pengeluaran BM atau NBM}}{\text{Total Pengeluaran}} \times 100$$

Dimana : BM = Bahan Makanan, dan NBM : Non Bahan Makanan

Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Dalam analisis ini untuk menghitung tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat digunakan pendekatan *indeks gini ratio*. Dalam menghitung indeks gini ratio diperlukan informasi tentang *pertama* jumlah rumah tangga atau penduduk, dan kedua Rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1 : Rata-Rata Interval Penghitungan Gini Ratio

Uraian	Interval							
	<100rb	100-149,9rb	150-199,9rb	200-299,9rb	300-499,9rb	500-749,9rb	750-999,9rb	>1jt
Rata-rata pengeluaran kapita per bulan								
Jumlah penduduk								
Total pengeluaran seluruh penduduk sebulan								
Proporsi penduduk (persen) P_i								
Kumulatif proporsi penduduk								
Proporsi pengeluaran (persen)								
Proporsi kumulatif total pengeluaran (persen) Q_i								
Q_i+Q_{i-1}								
$P_i(Q_i+Q_{i-1})$								
Gini Ratio								

Rumus untuk menghitung gini ratio:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$$

Dimana :

P_i = persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i

Q_i = persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i

Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:

- ♦ $G < 0,3$ = ketimpangan rendah
- ♦ $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang
- ♦ $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dilihat dari pola pengeluaran masyarakat tingkat kesejahteraan masyarakat menunjukkan kondisi yang lebih baik. Porsi pengeluaran masyarakat cenderung lebih besar alokasinya untuk memenuhi kebutuhan non bahan makanan dari pada untuk memenuhi kebutuhan makanan. Pada tahun 2008 porsi pengeluaran yang dialokasikan untuk bahan makanan sebesar 50,30 persen atau sebesar 49,70 persen dialokasikan untuk kebutuhan non bahan makanan. Pada tahun 2009 terjadi pergeseran porsi pengeluaran non bahan makanan yang lebih besar yaitu 51,66 persen sehingga porsi pengeluaran bahan makanan turun menjadi 48,34 persen.

Tabel 2 : Distribusi Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Di Provinsi Riau Tahun 2008-2009

KETERANGAN	2008	2009
BAHAN MAKANAN	50,30	48,34
Padi-padian	7,83	7,93
Umbi-umbian	0,59	0,63
Ikan	5,96	6,35
Daging	1,64	2,02
Telur dan susu	3,78	3,95
Sayur-sayuran	5,33	3,85
Kacang-kacangan	0,98	1,19
Buah-buahan	2,29	2,19
Minyak dan lemak	2,48	1,98
Bahan minuman	2,10	1,88
Bumbu-bumbuan	0,93	0,77
Konsumsi lainnya	1,39	1,44
Makanan & minuman jadi	9,40	6,89
Tembakau dan sirih	5,60	7,27
NON BAHAN MAKANAN	49,70	51,66
Perumahan & bahan bakar	19,71	18,43
Aneka barang & jasa	15,57	13,15
Pakaian, sepatu, topi	4,18	3,88
Bahan tahan lama	7,57	2,55
Pajak dan asuransi	0,99	12,87
Pesta & upacara	1,68	0,78
Total	100,00	100,00

Sumber : BPS (Susenas, 2009 dan 2010)

Alokasi pengeluaran untuk bahan makanan tertinggi dialokasikan untuk memenuhi konsumsi makanan dan minuman jadi, dimana pada tahun 2008 sebesar 9,40 persen walaupun pada tahun 2009 turun menjadi 6,89 persen. Sedangkan pengeluaran untuk konsumsi padi-padian pada tahun 2008 sebesar 7,83 persen dan tahun 2009 meningkat sebesar 0,1 persen sehingga menjadi 7,93 persen. Pengeluaran konsumsi masyarakat untuk tembakau dan sirih di Provinsi Riau cukup tinggi yaitu sebesar 5,60 persen ditahun 2008 dan meningkat menjadi 7,27 persen di tahun 2009. Sedangkan pengeluaran untuk konsumsi non bahan makanan porsi terbesar dialokasikan untuk perumahan dan bahan bakar yaitu 19,71 persen walaupun pada tahun 2009 cenderung turun menjadi 18,43 persen. Pengeluaran non bahan makanan tertinggi berikutnya adalah untuk aneka barang dan jasa yaitu 15,57 persen dan pada tahun 2009 cenderung turun menjadi sebesar 13,15 persen. Pengeluaran non bahan makanan untuk pengeluaran pajak dan asuransi mengalami peningkatan yang drastis pada tahun 2009, dimana tahun 2008 pengeluaran untuk pajak dan asuransi sebesar 0,99 pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar 12,87 persen.

Pada saat tingkat pendapatan rendah, maka sebagian besar pendapatan akan dialokasikan untuk memenuhi untuk konsumsi terutama untuk bahan makanan. Menurut Keynes bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal (*marginal propensity to consume*) dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara nol dan satu. Sedangkan rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (*avarage propensity to consume*), turun ketika pendapatan naik. Ia percaya bahwa tabungan adalah kemewahan, sehingga ia barharap orang kaya menabung dalam proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka ketimbang si miskin. Ketiga, keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan penting. Keynes menyatakan bahwa pengaruh tingkat bunga terhadap konsumsi hanya sebatas teori. Kesimpulannya bahwa pengaruh jangka pendek dari tingkat bunga terhadap pengeluaran individu dari pendapatannya bersifat sekunder dan relatif tidak penting. (Mankiw, 2003)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengeluaran perkapita masyarakat, proporsi alokasi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan semakin rendah, sedangkan proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan non makanan cenderung meningkat. Pada tahun 2009 penduduk dengan pengeluaran dibawah Rp. 100.000 per bulan di Provinsi Riau alokasi pengeluarannya sebagian besar yaitu 72,42 persen adalah untuk memenuhi kebutuhan makanan dan sisanya sebesar 27,58 persen untuk memenuhi kebutuhan non makanan. Pada kelompok masyarakat dengan kelas pengeluaran menengah (Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 749.999) proporsi pengeluaran perkapitanya sebagian besar masih dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan makanan, dimana pada tahun 2008 sebesar 51,30 persen dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 51,43 persen.

Menurut Friedman pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi 2 yaitu pendapatan permanen (*permanent income*) dan pendapatan sementara (*transitory income*). Pengertian dari pendapatan permanen adalah *pertama*, pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan dari gaji, upah. *Kedua* Pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang (yang menciptakan kekayaan). Sedangkan pendapatan sementara adalah pendapatan yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya. (Mangkoesebroto, 1998). Selanjutnya, Friedman juga menganggap bahwa tidak ada hubungan antara pendapatan sementara dengan pendapatan permanen, juga antara konsumsi sementara dengan konsumsi permanen, maupun konsumsi sementara dengan pendapatan sementara. Sehingga MPC dari pendapatan sementara sama dengan nol yang berarti bila konsumen menerima pendapatan sementara yang positif maka tidak akan mempengaruhi konsumsi. Demikian pula bila konsumen menerima pendapatan sementara yang negatif maka tidak akan mengurangi konsumsi. (Suparmoko, 1991).

Pada tingkat pengeluaran perkapita diatas Rp.750.000 per bulan, rata-rata pengeluaran penduduk untuk memenuhi kebutuhan makanan proporsinya sudah mulai berkurang dan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan non makanan. Pada kelas pengeluaran Rp. 750.000 sampai dengan Rp. 999.999 proporsi pengeluaran penduduk pada tahun 2008 untuk bahan makanan sebesar 44,40 persen dan untuk non bahan makanan sebesar 55,60 persen. Pada tahun 2009 pada kelas pengeluaran ini alokasi untuk bahan makanan cenderung meningkat menjadi 46,28 persen dan non bahan makanan turun menjadi 53,72 persen. Sedangkan pada kelas pengeluaran perkapita yang tinggi (didas Rp. 1.000.000), pada tahun 2008 untuk bahan makanan sebesar 44,40 persen dan untuk non makanan sebesar 55,60 persen. Pada tahun 2009 pada kelas pengeluaran yang sama (didas Rp 1.000.000) untuk konsumsi bahan makanan mengalami peningkatan menjadi 34,28 persen dan untuk konsumsi non makanan sebesar 65,72 persen.

Tabel 3 : Distribusi Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelas Pengeluaran di Provinsi Riau Tahun 2008-2009

KELAS PENGELUARAN	2008		2009	
	MAKANAN	NON MAKANAN	MAKANAN	NON MAKANAN
< 100,000	0.00	0.00	72,42	27,58
100,000 - 149,999	71.27	28.73	66,71	33,29
150,000 - 199,999	69.35	30.65	69,49	30,51
200,000 -299,999	67.99	32.01	63,16	36,84
300,000 - 499,999	58.59	41.41	56,97	43,03
500,000 - 749,999	51.30	48.70	51,43	48,57
750,000 - 999,999	44.40	55.60	46,28	53,72
1,000,000 <	32.86	67.14	34,28	65,72

Sumber : BPS (Susenas 2009 dan 2010)

Pembangunan ekonomi yang terus tumbuh dan berkembang di Provinsi Riau menjadikan daerah ini sebagai tujuan untuk mengadu kehidupan bagi penduduk dari daerah lainnya. Pertumbuhan penduduk suatu wilayah tentunya akan turut berkontribusi terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan suatu daerah. Penduduk sebagai pelaku pembangunan yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional dalam menghasilkan barang dan jasa memiliki produktivitas yang berbeda. Perbedaan tersebut sangat ditentukan oleh karakteristik kualitas faktor produksi yang dimilikinya. Pertumbuhan penduduk Provinsi Riau pada tahun 2009 yaitu tumbuh 2,26 persen. Sedangkan dilihat menurut kabupaten kota pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Rokan Hulu yaitu 3,76 persen dan Kabupaten Siak sebesar 3,15 persen. Sedangkan terendah adalah Kabupaten Bengkalis yaitu 1,13 persen. Kedua daerah (Siak dan Rokan Hulu) merupakan daerah dengan konsentrasi kegiatan penduduknya terutama pada usaha perkebunan kelapa sawit.

Tabel 4 : Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2008 dan 2009

KABUPATEN/KOTA	2008	2009
01. Kuantan Singingi	274.757	279.234
02. Indragiri Hulu	322.759	330.410
03. Indragiri Hilir	670.814	683.354
04. Pelalawan	280.197	285.813
05. Siak	322.417	332.562
06. Kampar	598.764	615.126
07. Rokan Hulu	398.089	413.056
08. Bengkalis	747.797	756.215
09. Rokan Hilir	551.402	565.558
10. Pekanbaru	785.380	802.788
11. Dumai	236.778	242.417
RIAU	5.189.154	5.306.533

Sumber : Susenas , 2009 dan 2010

Golongan pengeluaran mencerminkan tingkat pendapatan penduduk suatu daerah. Tingkat pendapatan penduduk tersebut dari waktu ke waktu diupayakan terus meningkat yang diiringi dengan peningkatan daya belinya, agar kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Golongan penduduk dengan pengeluaran perkapita terendah merupakan kelompok yang paling rentan terhadap gejolak harga kebutuhan pokok. Karena hampir sebagian besar pendapatan mereka dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Penduduk Provinsi Riau dengan golongan pengeluaran perkapita terendah yaitu dibawah Rp 1.00.000 per bulan pada tahun 2008 sebanyak 0,76 persen. Sedangkan dilihat menurut kabupaten/kota, selain Kabupaten Siak, Bengkalis, Kota Pekanbaru dan Dumai rata-rata golongan pengeluaran perkapita penduduk perbulannya masih berada dibawah Rp. 100.000 perbulan dengan persentase jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu 3,47 persen dan diikuti oleh Kabupaten Rokan Hulu yaitu 2,24 persen.

Antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 telah terjadi peningkatan kesejahteraan pada penduduk golongan pengeluaran perkapita terendah di Provinsi Riau. Persentase jumlah penduduk pada golongan pengeluaran perkapita terendah dapat diturunkan yaitu dari 0,76 persen ditahun 2008 menjadi 0,03 persen ditahun 2009. Hal ini berarti telah terjadi perbaikan kesejahteraan pada penduduk dengan golongan pengeluaran perkapita terendah (dibawah Rp. 100.000) perbulan bergeser pada golongan pengeluaran perkapita yang lebih tinggi. Demikian juga dengan penduduk pada golongan pengeluaran perkapita antara Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 149.999 ribu persentasenya dapat diturunkan dari 2,19 persen ditahun 2008 turun menjadi sebesar 0,69 persen pada tahun 2009. Peningkatan kesejahteraan penduduk juga terjadi sampai dengan golongan pengeluaran perkapita penduduk antara Rp. 200.000 sampai dengan Rp. 299.999 dimana pada tahun 2008 persentase penduduk pada golongan pengeluaran ini sebanyak 13,30 persen dapat diturunkan mejadi 13,19 persen pada tahun 2009.

Tabel 5 : Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan di Provinsi Riau Tahun 2008

KABUPATEN/ KOTA	GOLONGAN PENGELUARAN (ribuan)							
	< 100	100 - 149	150 - 199	200 - 299	300 - 499	500 - 749	750 - 999	1.000 <
01. Kuantan Singingi	3,47	2,73	2,28	15,31	22,71	20,75	12,38	20,37
02. Indragiri Hulu	0,54	3,33	7,13	9,91	31,85	25,56	10,06	11,62
03. Indragiri Hilir	0,98	7,37	6,66	26,67	31,08	16,1	7,65	3,49
04. Pelalawan	0,49	0,99	2,47	11,29	14,14	27,89	16,7	26,03
05. Siak	0	0,61	0,91	9,91	28,19	33,57	10,66	16,15
06. Kampar	1,12	0,56	5,05	14,02	33,13	19,67	10,7	15,75
07. Rokan Hulu	2,24	1,68	4,49	11,78	22,47	25,83	14,06	17,45
08. Bengkalis	0	1,87	2,43	10,99	24,05	21,4	21,41	17,85
09. Rokan Hilir	0,46	0,91	1,37	17,61	29,7	29,1	11	9,85
10. Pekanbaru	0	1,2	1,62	4,19	17,97	25,59	16,78	32,65
11. Dumai	0	1,23	1,84	13,03	24,17	21,16	14,29	24,28
RIAU	0,76	2,19	3,36	13,30	25,58	23,65	13,62	17,54

Sumber : Susenas , 2009 dan 2010

Sebagian besar penduduk Provinsi Riau rata-rata memiliki golongan pengeluaran perkapita berada pada golongan kelas menengah. Persentase jumlah penduduk pada golongan pengeluaran kelas menengah di Provinsi Riau mengalami peningkatan dari sebanyak 38,88 persen pada tahun 2008 meningkat menjadi sebanyak 51,06 persen pada tahun 2009. Peningkatan persentase jumlah penduduk pada golongan pengeluaran kelas menengah bukan hanya disebabkan oleh bergesernya tingkat kesejahteraan penduduk dari golongan pengeluaran perkapita terendah ke menengah tetapi juga disebabkan oleh penurunan tingkat kesejahteraan penduduk pada golongan pengeluaran perkapita tertinggi yang bergeser ke golongan pengeluaran perkapita penduduk pada kelas menengah.

Tabel 6 : Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan di Provinsi Riau Tahun 2009

KABUPATEN/ KOTA	GOLONGAN PENGELUARAN (Ribu)							
	< 100	100 - 149	150 - 199	200 - 299	300 - 499	500 - 749	750 - 999	1.000 <
01. Kuantan Singingi	0,00	0,07	1,95	12,99	44,57	27,53	6,69	6,20
02. Indragiri Hulu	0,00	0,41	1,45	14,66	42,33	28,56	6,51	6,08
03. Indragiri Hilir	0,00	2,65	7,92	21,71	40,27	21,48	4,38	1,59
04. Pelalawan	0,00	0,00	1,75	10,78	34,16	30,56	13,16	9,59
05. Siak	0,00	0,50	3,32	11,18	45,36	27,08	7,70	4,86
06. Kampar	0,00	0,91	2,10	14,59	42,90	23,77	7,95	7,78
07. Rokan Hulu	0,00	0,85	2,00	15,27	39,20	25,86	9,12	7,70
08. Bengkalis	0,00	0,36	0,58	7,05	33,59	32,56	10,84	15,02
09. Rokan Hilir	0,31	0,65	3,99	25,16	42,70	18,46	5,54	3,19
10. Pekanbaru	0,00	0,00	0,33	3,16	24,27	32,21	19,74	20,29
11. Dumai	0,00	0,00	1,05	10,18	43,45	26,65	9,48	9,19
RIAU	0,03	0,69	2,52	13,19	37,87	26,80	9,70	9,20

Sumber : Susenas , 2009 dan 2010

Banyak jumlah penduduk pada setiap Kabupaten/kota menurut golongan pengeluaran perkapita dapat mencerminkan besarnya kontribusi masing-masing penduduk pada setiap golongan pengeluaran. Semakin besar perbedaan kontribusi penduduk antar golongan pengeluaran, maka akan cenderung menciptakan distribusi pendapatan masyarakat suatu daerah yang relatif timpang. Golongan pengeluaran perkapita tertinggi (diatas Rp.1 juta) di Provinsi Riau pada tahun 2008 dinikmati oleh 17,54 persen penduduk dan tahun 2009 turun menjadi 9,20 persen. Hal ini berarti telah terjadi pergeseran kesejahteraan dari penduduk golongan pengeluaran perkapita tertinggi turun ke golongan pengeluaran perkapita kelas menengah.

Pergeseran persentase jumlah penduduk pada setiap golongan pengeluaran perkapita, baik dari golongan terendah ke menengah maupun dari yang tinggi ke golongan pengeluaran perkapita kelas menengah turut menentukan corak ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Riau. Berdasarkan angka indeks gini ratio, ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Provinsi Riau masih dalam kategori ketimpangan sedang. Namun demikian terdapat kecenderungan ketimpangan yang meningkat, dimana pada tahun 2008 indeks gini ratio Provinsi Riau sebesar 0,3441 dan meningkat menjadi 0,3560 pada tahun 2009. Menurut kabupaten/kota dengan ketimpangan terendah pada tahun 2008 adalah Kabupaten Rokan Hilir yaitu 0,2632 dan pada tahun 2009 adalah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 0,2659. Ketimpangan tertinggi terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 adalah Kabupaten Kampar yaitu sebesar 0,3621.

Tabel 7 : Hasil perhitungan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2008 dan 2009

KABUPATEN/KOTA	2008	2009
01. Kuantan Singingi	0,3827	0,3095
02. Indragiri Hulu	0,3039	0,3426
03. Indragiri Hilir	0,3531	0,2659
04. Pelalawan	0,2886	0,3395
05. Siak	0,2956	0,3072
06. Kampar	0,3553	0,3621
07. Rokan Hulu	0,3277	0,3287
08. Bengkalis	0,3083	0,3553
09. Rokan Hilir	0,2632	0,3121
10. Pekanbaru	0,3129	0,3498
11. Dumai	0,3819	0,3335
RIAU	0,3441	0,3560

Sumber : Diolah dari Data Susenas

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Riau dilihat dari indikator proporsi pengeluaran penduduk untuk bahan makanan dan non bahan makanan menunjukkan peningkatan. Porsi pengeluaran masyarakat cenderung lebih besar alokasinya untuk memenuhi kebutuhan non bahan makanan dari pada untuk memenuhi kebutuhan makanan. Pada tahun 2008 porsi pengeluaran yang dialokasikan untuk bahan makanan sebesar 50,30 persen atau sebesar 49,70 persen dialokasikan untuk kebutuhan non bahan makanan. Pada tahun 2009 terjadi pergeseran porsi pengeluaran non bahan makanan yang lebih besar yaitu 51,66 persen sehingga porsi pengeluaran bahan makanan turun menjadi 48,34 persen.
2. Antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 di Provinsi Riau telah terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk dari golongan pengeluaran perkapita kelas terendah bergeser ke golongan pengeluaran perkapita kelas menengah. Namun demikian juga terjadi penurunan kesejahteraan pada golongan penduduk dengan pengeluaran perkapita kelas tertinggi bergeser ke kelas menengah.
3. Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Provinsi Riau yang tercermin dari angka indeks gini ratio menunjukkan tingkat ketimpangan yang sedang. Namun demikian kecenderungan ketimpangan yang meningkat.

B. Saran

Tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Riau yang terus meningkat harus diiringi dengan peningkatan kualitas faktor produksi yang dimiliki oleh setiap penduduk dan faktor produksi tersebut harus didistribusikan secara berkeadilan bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. (1998), *Ekonomi Pembangunan* : edisi kedua, STIE YKPN, Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik, 2006. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau Tahun 2006 : Survey Sosial Ekonomi Nasional 2005.
- Mangkoesebroto, Guritno. Dan Algifari (1998), *Teori Ekonomi Makro*, Yogyakarta, STIE YKPN.
- Mankiw, N. Gregory. (2003), *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sukirno, Sadono. 2003, *Pengantar Teori Makro Ekonomi”(ed.2)”*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supadi dan Nurmanaf AR, 2004. Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Pedesaan dan Kaitannya dengan Tingkat Kemiskinan. Pusat Analisis Sosek dan Kebijakan Pertanian Badan Litbang Departemen Pertanian, Bogor.
- Suparmoko, M. (1991), *Pengantar Ekonomika Makro*, BPFE, Yogyakarta.
- Zakaria AK dan Swastika DKS, 2004. Keragaan usahatani petani miskin pada lahan kering dan sawah tadah hujan (Studi kasus di Kabupaten Temanggung). Pusat Analisis Sosek dan Kebijakan Pertanian Badan Litbang Departemen Pertanian, Bogor.